



**WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

### Pasal 8

- (1) Penerapan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar searah dan selaras dengan IKU Kota.
- (3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota yang menjadi tanggung jawabnya.

### Pasal 9

- (1) Evaluasi IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal:
  - a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. terdapat perubahan arah kebijakan pemerintah Kota dalam menentukan arah pembangunan;
  - c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output dan outcome sebagai pendukung capaian IKU; dan
  - d. IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan
- (2) Evaluasi IKU Kota dan IKU perangkat daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## BAB V

### KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Koordinasi dan pengembangan dalam penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN 1111 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.



5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
15. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
16. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
17. Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai suatu sasaran strategis.
18. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya disebut IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
19. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
20. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/ perangkat daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN IKU

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU.
- (2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja perangkat daerah yang disusun dan diusulkan perangkat daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan IKU sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
  - a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
  - b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;

- c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan
  - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, kepala perangkat daerah melaporkan hambatan yang ada kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pengembangan dan perbaikan IKU perangkat daerah.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN EVALUASI IKU

#### Pasal 7

IKU Kota dan IKU perangkat daerah digunakan untuk:

- a. bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja berjenjang;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,  
ttd  
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 30 Agustus 2018  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang  
ttd  
BUJANG SUKRI

**BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 41 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

1. Visi Organisasi : Singkawang Hebat 2022
2. Misi :
  - a. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya
  - b. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri
  - c. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
  - d. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
  - e. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas
  - f. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan
  - g. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat	1 Angka kriminalitas yang tertangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Singkawang, Badan Pusat Statistik dan Data lain yang dapat dipertanggungjawabkan	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$
		2 Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$
2	Terbinanya Pengembangan Potensi Organisasi/lembaga Kemasyarakatan, Sosial, Politik dan Keagamaan	1 Persentase ormas/LSM yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\text{Jumlah Ormas yang aktif dan memenuhi syarat}}{\text{Jumlah Total Ormas}} \times 100\%$



1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pengembangan dan Kelestarian Budaya	1 Persentase situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya dimiliki daerah}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kemandirian dan kehandalan koperasi dan UMKM	1 Cakupan UMKM yang aktif	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang aktif}}{\text{Jumlah UMKM di Kota Singkawang}}$
		2 Persentase koperasi yang aktif	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang aktif}}{\text{Jumlah total koperasi}} \times 100\%$
5	Meningkatnya produktivitas industri lokal	1 Pertumbuhan PDRB sektor industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM dan Data Proyeksi BAPPEDA Kota Singkawang	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri pada PDRB tahun n} - \text{Kontribusi Sektor Industri pada PDRB tahun n-1}}{\text{Kontribusi Sektor Industri pada PDRB tahun n-1}} \times 100\%$
6	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Cakupan pengelolaan ekonomi kreatif (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	$\frac{\text{Jumlah sub sektor yang ditangani}}{\text{Jumlah total sub sektor kota}} \times 100\%$
7	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan	1 Tingkat pengangguran terbuka	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$
		2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada pasar kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$
8	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Sosial	1 Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada di Kota Singkawang}} \times 100\%$
9	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Terwujudnya Ketahanan Pangan	1 Pertumbuhan FDRB sektor Pertanian (%)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Data Proyeksi BAPPEDA Kota Singkawang	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun n} - \text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun n-1}}{\text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun n-1}} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6																														
		2 Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	$\frac{\text{Rata-rata ketersediaan pangan utama 1 Th (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$																														
10	Meningkatnya produksi Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	1 Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan (%)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Badan Pusat Statistik dan Data Proyeksi BAPPEDA Kota Singkawang	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun n - Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun n-1}}{\text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun n-1}} \times 100\%$																														
11	Terkendalnya pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	1 Ketaatan terhadap RTRW (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$																														
		2 Indeks Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Indeks tutupan lahan} + \text{Indeks kualitas air} + \text{Indeks kualitas udara}}{3}$																														
		3 Rasio RTH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Luas RTH publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH publik yang seharusnya tersedia diwilayah kota/ kawasan perkotaan}} \times 100\%$																														
12	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat ukur yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.</p> <p>IKM merupakan indikator terintegrasi berbagai penilaian IKM untuk mengukur CS = 100 maka hasil penilaian tersebut dapat dikategorikan sebagai baik, cukup, dan kurang sebagai berikut:</p> <p>IKM Untuk Pelayanan di DB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SKOR IKM</th> <th>KATEGORI</th> <th>INDIKATOR</th> <th>INDIKATOR</th> <th>INDIKATOR</th> <th>INDIKATOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BURUK</td> <td>100 - 75</td> <td>100 - 75</td> <td>100 - 75</td> <td>100 - 75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CUKUP</td> <td>75 - 50</td> <td>75 - 50</td> <td>75 - 50</td> <td>75 - 50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BAIK</td> <td>50 - 25</td> <td>50 - 25</td> <td>50 - 25</td> <td>50 - 25</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SEBAGAI BAIK</td> <td>25 - 0</td> <td>25 - 0</td> <td>25 - 0</td> <td>25 - 0</td> </tr> </tbody> </table>	SKOR IKM	KATEGORI	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	1	BURUK	100 - 75	100 - 75	100 - 75	100 - 75	2	CUKUP	75 - 50	75 - 50	75 - 50	75 - 50	3	BAIK	50 - 25	50 - 25	50 - 25	50 - 25	4	SEBAGAI BAIK	25 - 0	25 - 0	25 - 0	25 - 0
		SKOR IKM	KATEGORI	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR																												
1	BURUK	100 - 75	100 - 75	100 - 75	100 - 75																														
2	CUKUP	75 - 50	75 - 50	75 - 50	75 - 50																														
3	BAIK	50 - 25	50 - 25	50 - 25	50 - 25																														
4	SEBAGAI BAIK	25 - 0	25 - 0	25 - 0	25 - 0																														
2 Persentase penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan TI dalam Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$																																
13	Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah	1 Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai jabatan (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	$\frac{\text{Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$																														

1	2	3	4	5	6
		2 Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi (%)	Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat Peningkatan Kompetensi}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100\%$
14	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
		2 Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Opini BPK pada hasil audit terhadap laporan keuangan daerah pada tahun n
15	Terlaksananya sistem pengawasan yang efektif dan efisien	1 Maturitas SPIP	Inspektorat Kota	Inspektorat Kota	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		2 Tingkat kapabilitas APIP	Inspektorat Kota	Inspektorat Kota	Nilai Kapabilitas APIP
16	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	1 Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	BAPPEDA	BAPPEDA	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan}} \times 100\%$
		2 LAKIP	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Hasil Penilaian Laporan Angkutabilitas Kinerja Oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan dan KB	Dinas Kesehatan dan KB	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif Usia Meninggal}}{\text{Jumlah yang Meninggal}}$
18	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	2 Laju pertumbuhan penduduk	Dinas Kesehatan dan KB	Dinas Kesehatan dan KB	$r = \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \times 100$ <p> <math>r</math> = laju pertumbuhan penduduk  <math>P_t</math> = Jumlah penduduk pada tahun t  <math>P_0</math> = Jumlah penduduk pada tahun dasar  <math>t</math> = selisih tahun <math>P_t</math> dengan <math>P_0</math> </p> $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ <p> <math>P_t</math> = Jumlah penduduk pada tahun ke t  <math>P_0</math> = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)  <math>B</math> (Birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t  <math>D</math> (Death) = Jumlah kematian selama periode 0 - t  <math>M_o</math> = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t  <math>M_i</math> = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t </p>
19	Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Angka rata-rata lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Tahun Pendidikan Penduduk Usia 15 Ke atas}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6
		2 Angka Melek Huruf	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Ke atas Bisa Baca Tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100\%$
		3 Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Pusat Statistik	$\frac{\text{Proyeksi Angka Harapan Lama Sekolah dari BPS}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas}} \times 100\%$
20	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 Persentase pengunjung Perpustakaan setiap tahunnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun n} - \text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun n-1}}{\text{Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun n}} \times 100\%$
21	Meningkatnya kualitas dan peran pemuda	2 Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$
22	Meningkatnya pembinaan prestasi olahraga	1 Cakupan pembinaan olah raga (cabang)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	$\frac{\text{Jumlah cabang olah raga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olah raga yang ada/ terdaftar}} \times 100\%$
		2 Jumlah Atlet berprestasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah atlet yang memerangi kejuaraan tingkat Provinsi dan Nasional dalam satu tahun
23	Tersedia infrastruktur perkotaan yang berkualitas	1 Persentase Jalan mantap (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan seluruhnya}} \times 100\%$
		2 Persentase penduduk berakses air minum (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
		3 Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
		4 Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal Bis kondisi baik	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal Bis yang ada di Kota Singkawang
		5 Persentase Panjang jalan yang mendapat penerangan (%)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	$\frac{\text{Panjang Jalan yang sudah terpasang PJU}}{\text{Total seluruh panjang jalan yang ada di Kota Singkawang}} \times 100\%$

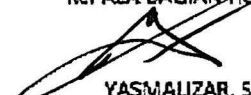
1	2	3	4	5	6
24	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	1 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dan Proyeksi PDRB dari BPS yang diolah BAPPEDA	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB tahun n} - \text{Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB tahun n-1}}{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB tahun n-1}} \times 100\%$
25	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	1 Persentase PAD sektor pariwisata (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Proyeksi PDRB dari BPS yang diolah BAPPEDA	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun n} - \text{Jumlah kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun n-1}}{\text{Jumlah kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun n}} \times 100\%$

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 30 Agustus 2018  
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

T: HAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004